

ABSTRAK

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak bertanggung membayarkan iuran/kontribusi/premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi memiliki fungsi pengalih resiko. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai payung hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan untuk memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA? Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan memahami pertimbangan hakim pada perkara putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah dalam penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Asuransi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

KARAWANG

ABSTRACT

Insurance is an agreement between two or more people in which the insured party pays contributions/contributions/premiums to receive compensation for risks, losses, damages or losses that may occur as a result of unexpected events. Insurance has a risk transfer function. This has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. As a legal umbrella, the Consumer Protection Act was enacted to provide protection in the form of rights and obligations to consumers. Are the legal consequences for business actors in insurance according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? What is the judge's consideration of decision number 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA? The purpose of this study is to find out the legal consequences for business actors in insurance according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and understand the judge's considerations in the case of decision Number 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. To answer the problems that exist in this study, researchers used qualitative methods with a normative juridical approach. The conclusion of this study is that in the settlement of insurance claims for loss of motorized vehicles that are contrary to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Consumen protection, Insurance, Law Number 8 Year 1999*

